



Kembalikan Tata Ruang Kota

Masa Tenang, H-1 Harus Bebas APK

JOGJA - Tak ada toleransi terhadap alat peraga kampanye (APK) menjelang coblosan pemilihan umum. Semua APK wajib diturunkan. Terlebih, Peraturan Wali Kota Jogja (Perwal) Nomor 67 Tahun 2013 menegaskan aturan itu. Perwal tersebut menyatakan APK harus bersih pada H-1 pencoblosan pemilu 9 April 2014.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti meminta kesadaran seluruh simpatisan

dan kader parpol untuk menurunkan atribut parpol masing-masing saat memasuki masa tenang.

"Memasuki masa tenang agar APK dibersihkan. Selaku pemangku wilayah, pemkot akan membantu menurunkan. Agar regulasi yang sudah ada dipatuhi dan menciptakan Jogja yang nyaman dan damai," terang Haryadi usai pembekalan anggota perlindungan masyarakat (linmas) di Balai Kota Jogja (5/4).

Penurunan APK dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yakni gotong royong. "Mulai Minggu (6/4) hingga H-1 pencoblosan, upaya membersihkan APK dapat maksimal. Perlu adanya

kesadaran dari petugas dan simpatisan parpol untuk ikut menurunkan APK. Ini komitmen bersama menjaga masa

tenang jelang pencoblosan, ujarnya.

Pemkot dan Panwaslu Kota Jogja akan mengawasi proses pencopotan. Pemkot berharap tata ruang Kota Jogja kembali rapi dan bersih dari

APK. Untuk mengembalikan keindahan tata ruang Kota Jogja, Haryadi berharap adanya kesadaran dari masyarakat.

"Dengan begitu, dapat saling



2014
PEMILIHAN UMUM

menghargai masa tenang ini. Mari wujudkan Jogja yang istimewa dalam penyelenggaraan pemilu yang damai, nyaman, jujur dan adil," ungkapnya.

Ketua Panwaslu Kota Jogja Agus Triyatno mengatakan, masih ada ribuan APK yang terpasang di berbagai lokasi di Kota Jogja. Ribuan APK itu belum diturunkan. Hal itu jelas merupakan sebuah pelanggaran.

"Ini sudah memasuki masa tenang. Seharusnya komitmen dan kesadaran dari masing-masing parpol sangat diperlukan," ucapnya.

Di sisi lain, KPU Kota Jogja menyediakan *template* surat

suara DPRD kota sebanyak 84 lembar sesuai jumlah TPS. *Template* itu untuk penyandang tunanetra. Alat bantu tersebut akan distribusikan pada 7 April.

Sedangkan terkait *template* surat suara untuk DPR RI, KPU Kota belum menerima. Hingga kemarin *template* belum ada.

Komisioner KPU DIJ Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Farid Bambang Siswanto mengatakan, *template* untuk DPR RI akan distribusikan pada 8 April. Itu karena pengadaannya butuh relatif lama. Itu terkait adanya perubahan data jumlah *template*. (hrp/amd/ty)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 03 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005